

ANALISIS DAMPAK PENYEBARAN HOAKS POLITIK DI MEDIA SOSIAL TERHADAP INTEGRASI NASIONAL DI INDONESIA

Jenni Hotmaida Sihotang¹, Natasya Sitohang², Amanda Gledis Br Ginting³,
Febri Valerin Nadela⁴, Nazwa Alifia Irsyah Putri⁵, Sri Yunita⁶

¹⁻⁶ Manajemen, Universitas Negeri Medan, Medan

e-mail: jennihs0118@gmail.com, nsitohang61@gmail.com, amandagledis773@gmail.com,
febridella15@gmail.com, nazwaalifiaps13@gmail.com, sr.yunita@unimed.ac.id

ABSTRACT

The spread of political hoaxes on social media has become an increasingly alarming phenomenon in the dynamics of modern democracy, particularly in Indonesia. Hoaxes serve not only as misleading information but also as strategic tools for shaping public perception and influencing political preferences. This study aims to analyze the characteristics of the spread of political hoaxes, their impact on social polarization, and their implications for national integration in Indonesia. The method used is a qualitative approach through a literature review, examining various scientific sources and official reports related to disinformation. The results indicate that political hoaxes tend to exploit identity-based issues such as religion, ethnicity, and ideology to foster emotional engagement among the public. Additionally, social media algorithms accelerate the spread of false information without verifying its validity. The resulting impacts include increased social polarization, diminished trust in state institutions, and weakened social cohesion the foundation of national integration. Therefore, comprehensive countermeasures are needed through improved digital literacy, the active role of social media platforms, and collaboration among various stakeholders to safeguard the public's information resilience.

Keywords : *political hoaxes, social media, social polarization, national integration, disinformation*

ABSTRAK

Penyebaran hoaks politik di media sosial menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam dinamika demokrasi modern, khususnya di Indonesia. Hoaks tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang menyesatkan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi preferensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penyebaran hoaks politik, dampaknya terhadap polarisasi sosial, serta implikasinya terhadap integrasi nasional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah dan laporan resmi terkait disinformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks politik cenderung memanfaatkan isu identitas seperti agama, etnis, dan ideologi untuk membangun keterikatan emosional masyarakat. Selain itu, algoritma media sosial turut mempercepat penyebaran informasi palsu tanpa mempertimbangkan validitasnya. Dampak yang ditimbulkan meliputi meningkatnya polarisasi sosial, menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara, serta melemahnya kohesi sosial yang menjadi dasar integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif melalui peningkatan literasi digital, peran aktif platform media sosial, serta kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ketahanan informasi masyarakat.

Kata kunci: hoaks politik, media sosial, polarisasi sosial, integrasi nasional, disinformasi

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola penyebaran informasi di masyarakat. Kehadiran media sosial sebagai platform digital memberi setiap orang kesempatan untuk membuat dan menyebarkan informasi dengan cepat dan luas tanpa proses verifikasi yang ketat. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya penyebaran disinformasi, termasuk hoaks politik, di ruang digital. Disinformasi dianggap sebagai penyebaran informasi yang sengaja dimanipulasi untuk memengaruhi pandangan publik, membentuk opini politik tertentu, dan menciptakan kebingungan di dunia digital (Farkas & Schou, 2023).

Fenomena hoaks politik semakin sering terjadi, terutama saat momen politik seperti pemilihan umum. Di Indonesia, penyebaran hoaks kini tidak hanya terjadi secara acak tetapi berkembang melalui pola komunikasi digital yang teratur dan dapat memengaruhi opini publik secara luas (Azis et al., 2025). Penelitian oleh Muhammad et al. (2024) menunjukkan bahwa interaksi komunikasi hoaks di media sosial terus meningkat dan banyak terkait dengan isu politik serta pembentukan opini masyarakat di dunia digital. Situasi ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks politik menjadi tantangan serius karena ia dapat memengaruhi stabilitas sosial dan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, Boestam et al. (2023) mencatat bahwa informasi palsu di media sosial terjadi dengan cepat karena didukung oleh pola komunikasi digital yang luas dan sulit dikendalikan.

Salah satu faktor yang menyebabkan hoaks politik mudah menyebar adalah karakteristik kontennya yang provokatif dan emosional. Penelitian oleh Chuai dan Zhao (2022) menunjukkan bahwa informasi palsu di media sosial lebih mudah menyebar saat mengandung emosi negatif seperti kemarahan dan ketakutan. Emosi tersebut dapat menarik perhatian

pengguna dengan cepat. Selain itu, menurut Ahmad (2022) menjelaskan bahwa algoritma media sosial memperkuat penyebaran disinformasi. Algoritma tersebut menampilkan konten berdasarkan preferensi dan keyakinan pengguna tanpa memperhatikan validitas informasi.

Dampak disinformasi politik tidak hanya terbatas pada kesalahan informasi. Penyebaran ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi sosial. Polarisasi dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengancam integrasi nasional. Hameleers, Brosius, dan de Vreese (2022) menjelaskan bahwa paparan disinformasi di media digital dapat memperkuat kecenderungan individu untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Hal ini meningkatkan potensi polarisasi sosial di masyarakat.

Di Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, kondisi tersebut menjadi tantangan penting. Integrasi nasional yang berdasarkan pada persatuan dan kepercayaan sosial bisa terganggu oleh penyebaran hoaks. Fenomena tersebut dapat memperkuat perbedaan dan konflik antar kelompok. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penyebaran hoaks politik memengaruhi dinamika sosial serta implikasinya terhadap integrasi nasional di Indonesia.

Meskipun penelitian mengenai hoaks dan media sosial telah banyak dilakukan, kajian yang membahas dampak penyebaran hoaks politik terhadap integrasi nasional di Indonesia masih perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hoaks politik di media sosial dapat memengaruhi kehidupan sosial dan persatuan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis karakteristik penyebaran hoaks politik di media sosial.
2. Mengkaji dampak hoaks politik terhadap polarisasi sosial di masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena hoaks politik secara mendalam melalui analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta publikasi akademik yang berkaitan dengan hoaks, disinformasi, media sosial, dan integrasi nasional. Beberapa sumber utama yang digunakan antara lain penelitian dari Ati et al. (2023), Ahmad (2022), serta Hidayati dan Hayat (2024). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan data.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan topik penelitian.
2. Penyajian data, yaitu mengorganisasi informasi dalam bentuk narasi yang sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan temuan berdasarkan keterkaitan antar konsep dan teori.

Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengaitkan temuan literatur terhadap konteks Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, serta implikasi penyebaran hoaks politik terhadap kehidupan sosial dan integrasi nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil literatur, hoaks politik merupakan bentuk disinformasi

3. Menganalisis dampak penyebaran hoaks politik terhadap integrasi nasional di Indonesia.

yang dibuat dengan sengaja untuk mempengaruhi pandangan publik dalam ranah politik dan persaingan kekuasaan. Dalam konteks fenomena disorder informasi, hoaks tidak hanya merujuk pada informasi yang sepenuhnya salah, tetapi juga mencakup manipulasi konteks, distorsi fakta, dan penyampaian data yang tidak lengkap sehingga menyesatkan. Disinformasi di ruang digital merupakan praktik menyebarkan informasi yang dimanipulasi untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk pandangan masyarakat tentang isu sosial dan politik secara sistematis (Azis et al., 2025).

a. Karakteristik dan Penyebaran Hoaks Politik di Media Sosial

Di Indonesia, karakter hoaks politik terlihat jelas dalam pemanfaatan isu identitas seperti agama, etnis, dan ideologi. Pemanfaatan identitas tersebut bertujuan meningkatkan daya tarik pesan dan membangun kedekatan emosional di antara kelompok tertentu. Disinformasi di media sosial sering kali berkembang melalui isu identitas dan kedekatan kelompok. Informasi yang sesuai dengan pandangan sosial pengguna lebih mudah diterima dan disebarkan kembali (Diaz Ruiz & Nilsson, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih mudah menerima informasi yang sejalan dengan keyakinan kelompoknya, sehingga kemampuan untuk memverifikasi informasi secara kritis menjadi semakin lemah.

Selain itu, hoaks politik biasanya disajikan dalam format narasi yang sederhana, provokatif, dan mudah dipahami. Penyederhanaan narasi membuat hoaks lebih mudah diterima dibandingkan informasi faktual yang umumnya lebih kompleks. Diaz Ruiz dan Nilsson (2023)

menunjukkan bahwa disinformasi di media sosial menyebar lebih mudah karena disampaikan dalam narasi yang membangun keterlibatan emosional dan memperkuat identitas kelompok pengguna. Sun (2022) juga menyatakan bahwa algoritma media sosial mempercepat penyebaran disinformasi dengan sistem rekomendasi konten yang mendorong distribusi informasi secara luas tanpa proses verifikasi yang layak. Oleh karena itu, ekosistem digital secara struktural mendukung berkembangnya hoaks. Adanya aktor digital seperti buzzer semakin memperkuat pola tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran hoaks politik di media sosial tidak terjadi secara alami semata, tetapi juga didukung oleh sistem digital yang memungkinkan informasi emosional dan provokatif tersebar lebih cepat dibandingkan informasi faktual. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih rentan menerima informasi tanpa melakukan verifikasi secara kritis. Nurhaliza et al. (2023) menjelaskan bahwa media sosial sering digunakan untuk membentuk opini publik melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas dalam proses politik digital. Akibatnya, penyebaran hoaks tidak lagi berlangsung secara spontan, tetapi semakin terarah dan terorganisir.

Dalam konteks Pemilu, kerentanan ruang digital terhadap hoaks telah terbukti dalam penelitian terbaru di Indonesia. Novarizal (2023) mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukan 101 isu hoaks terkait Pemilu dari 19 Januari 2022 hingga 26 Oktober 2023 di berbagai platform media sosial. Selain itu, antara 17 Juli hingga 26 November 2023, terdapat 96 isu hoaks Pemilu yang menyebar dalam 355 konten digital. Data tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang yang sangat rentan terhadap penyebaran hoaks politik, terutama menjelang Pemilu. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa Facebook adalah salah satu platform yang

paling banyak digunakan untuk penyebaran hoaks politik. Sejalan, Azis et al. (2025) menyatakan bahwa eskalasi fenomena disorder informasi politik di Indonesia terus meningkat dalam satu dekade ini dan menjadi lebih intens menjelang masa pemilihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa momentum politik, khususnya Pemilu, menjadi kondisi yang sangat rentan terhadap meningkatnya produksi dan penyebaran hoaks di ruang digital.

Dari sudut pandang psikologis, penyebaran hoaks juga dipengaruhi oleh bias kognitif individu. Pennycook dan Rand (2022) menjelaskan bahwa perhatian individu terhadap akurasi informasi sangat memengaruhi kecenderungan seseorang dalam mempercayai dan menyebarkan informasi palsu di media sosial. Kondisi ini semakin diperkuat karena rendahnya kompetensi literasi digital masyarakat dalam menyaring informasi di media sosial. Hidayati dan Hayat (2023) mengungkapkan bahwa kemampuan literasi digital yang rendah menyebabkan masyarakat lebih mudah menerima dan menyebarkan hoaks tanpa verifikasi. Selain itu, Ati et al. (2023) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung percaya pada informasi dari lingkungan sosial dan kelompok sependapat, sehingga mempercepat penyebaran disinformasi di media sosial. Dengan demikian, penyebaran hoaks politik merupakan hasil interaksi antara faktor teknologi, sosial, dan psikologis yang kompleks.

b. Dampak Hoaks Politik terhadap Polarisasi dan Disintegrasi Sosial

Penyebaran hoaks politik berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi sosial di masyarakat. Polarisasi yang awalnya merupakan konsekuensi alami dari perbedaan preferensi masyarakat dalam sistem demokrasi kini berubah menjadi pembelahan sosial yang tajam dan emosional. Hameleers et al. (2022) menjelaskan bahwa paparan disinformasi di media digital dapat memperkuat kecenderungan individu untuk

mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan kelompoknya sendiri dan mengurangi keterbukaan terhadap perspektif alternatif. Dengan begitu, hoaks tidak hanya memengaruhi opini, tetapi juga membentuk identitas sosial yang eksklusif dan sulit menerima perbedaan.

Di Indonesia, fenomena ini menjadi lebih intens pada momen politik, terutama selama Pemilu 2019. Azis et al. (2025) menjelaskan bahwa peningkatan fenomena disorder informasi politik di ruang digital mendorong penyebaran disinformasi politik secara besar-besaran dan terorganisasi untuk memengaruhi persepsi publik. Narasi yang beredar tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengandung provokasi, manipulasi, serta eksploitasi isu identitas yang memperkuat dikotomi “kami” versus “mereka.” Kondisi ini mempercepat terciptanya segregasi sosial berdasarkan preferensi politik dan identitas kelompok.

Selain itu, hoaks politik dirancang untuk memicu respons emosional yang kuat. Konten yang sensasional, mengancam, atau menunjukkan ketidakadilan lebih mudah menarik perhatian dan disebar kembali. Ahmad (2022) menjelaskan bahwa disinformasi di media sosial dapat memperkuat polarisasi politik karena masyarakat cenderung terjebak di lingkungan informasi yang hanya mendukung pandangan kelompoknya sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin sulit menerima sudut pandang yang berbeda sehingga ruang diskusi publik menjadi lebih tertutup dan rentan terhadap konflik.

Fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* semakin memperkuat dinamika polarisasi ini. Diaz Ruiz dan Nilsson (2023) menjelaskan bahwa disinformasi di media sosial berkembang dalam kelompok pengguna dengan pandangan dan identitas serupa. Kondisi ini menyebabkan individu lebih sering terpapar informasi yang mendukung keyakinannya sendiri. Selain itu, Chan et al. (2023) menunjukkan bahwa

lingkungan media sosial yang homogen dapat memperkuat pandangan politik yang sudah ada, serta mengurangi keterbukaan masyarakat terhadap perspektif yang berbeda. Akibatnya, hoaks tidak hanya menyebar luas, tetapi juga semakin diperkuat dalam lingkungan sosial yang homogen.

Dalam jangka panjang, akumulasi polarisasi ini bisa mengarah pada disintegrasi sosial. Menurunnya kepercayaan antar kelompok melemahkan kohesi sosial yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ruang publik yang seharusnya menjadi arena diskusi rasional mengalami pergeseran menjadi tempat konflik yang dikuasai oleh disinformasi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, karena keputusan publik tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi pada persepsi yang terdistorsi.

Lebih jauh, disintegrasi sosial yang disebabkan oleh hoaks juga memiliki dampak yang lebih luas, termasuk stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Ketidakstabilan sosial bisa menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta meningkatkan potensi konflik sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, dampak hoaks politik tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi juga mencakup dimensi struktural yang memengaruhi ketahanan nasional secara keseluruhan.

c. Pengaruh Hoaks Politik terhadap Integrasi Nasional di Indonesia

Integrasi nasional mencerminkan persatuan, solidaritas, dan keyakinan masyarakat terhadap sistem sosial dan politik. Dalam konteks tersebut, penyebaran hoaks politik menjadi ancaman serius karena dapat merusak fondasi kepercayaan publik yang mengikat integrasi nasional. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap disinformasi berkaitan dengan menurunnya kepercayaan terhadap media dan institusi

publik. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas sosial dalam kehidupan demokrasi (Hameleers et al., 2022).

Salah satu implikasi utama dari penyebaran hoaks politik adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ahmad (2022) menjelaskan bahwa disinformasi di media sosial membuat masyarakat kesulitan membedakan fakta dan opini. Algoritma digital sering kali hanya menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, tanpa mempertimbangkan validitasnya. Ketidakpastian ini mendorong skeptisisme terhadap pemerintah, hasil pemilu, dan kebijakan publik. Selain itu, Zozaya-Durazo et al. (2024) menjelaskan bahwa paparan informasi palsu secara terus-menerus di media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta memperkuat ketidakpercayaan terhadap informasi publik yang beredar di ruang digital.

Di Indonesia, penurunan kepercayaan ini memiliki dampak luas. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara cenderung merasa apatis terhadap politik. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menjadi kurang terlibat dalam proses politik. Hal ini berdampak pada menurunnya partisipasi politik dan melemahnya legitimasi pemerintah. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengganggu stabilitas politik dan memperlemah integrasi nasional.

Selain itu, hoaks politik juga berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, toleransi, dan kerja sama. Azis et al. (2025) menjelaskan bahwa eskalasi disinformasi politik di ruang digital dapat memperkuat polarisasi sosial dan memengaruhi stabilitas hubungan antarkelompok dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas dan mengancam keutuhan bangsa.

Lebih jauh, hoaks politik memperkuat fragmentasi identitas sosial

berdasarkan kelompok tertentu. Penelitian oleh Hidayati et al. (2023) menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi di media digital membuat individu lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan pandangan kelompoknya. Akibatnya, masyarakat semakin kesulitan menerima perbedaan pendapat dan dialog dalam kehidupan demokrasi menjadi semakin terbatas. Hal ini membuat hubungan sosial antarkelompok lebih rentan terhadap konflik dan polarisasi.

Dari perspektif jangka panjang, dampak hoaks terhadap integrasi nasional tidak hanya bersifat sementara; tetapi juga dapat menjadi masalah struktural. Penyebaran disinformasi yang terus-menerus dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan memicu ketidakstabilan politik. Jika situasi terus berlangsung tanpa penanganan yang memadai, hal ini dapat mengarah pada melemahnya integrasi nasional yang mengancam keutuhan negara.

d. Upaya Penanggulangan Hoaks dalam Menjaga Integrasi Nasional

Penanggulangan hoaks politik adalah langkah penting untuk menjaga integrasi nasional di era digital. Mengingat kompleksitas penyebaran hoaks yang melibatkan teknologi, sosial, dan psikologis, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan untuk mengendalikan penyebaran disinformasi melalui penguatan regulasi digital, peningkatan pengawasan terhadap manipulasi informasi, dan kerja sama dengan berbagai platform media sosial untuk menjaga stabilitas demokrasi di ruang digital (Jungherr, 2024).

Salah satu strategi utama adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Ati et al. (2023) menjelaskan bahwa literasi digital membantu masyarakat memahami cara memeriksa kebenaran informasi dan meningkatkan sikap kritis terhadap berita

bohong di media sosial. Sejalan dengan itu, Hidayati et al. (2024) menunjukkan bahwa edukasi tentang deteksi hoaks dan ujaran kebencian mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali informasi palsu di ruang digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi penyebaran hoaks.

Selain itu, platform media sosial memiliki tanggung jawab besar dalam mengendalikan penyebaran hoaks. Cavus et al. (2024) menjelaskan bahwa sistem deteksi hoaks berbasis kecerdasan buatan dapat membantu mengenali pola penyebaran informasi palsu dengan cepat di media sosial. Dengan demikian, penanganan disinformasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi digital dan kebijakan moderasi konten yang jelas menjadi langkah penting untuk mengurangi penyebaran hoaks dan menjaga kepercayaan pengguna pada platform media sosial.

Upaya penanggulangan hoaks juga perlu didukung melalui peningkatan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan. Andriarti et al. (2024) menjelaskan bahwa edukasi literasi digital terkait Pemilu 2024 dapat meningkatkan kemampuan masyarakat mengenali ciri-ciri hoaks, memahami pentingnya verifikasi informasi, dan membangun sikap kritis terhadap konten politik di media sosial. Penelitian itu

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoaks politik di media sosial memiliki keterkaitan erat dengan dinamika sosial dan integrasi nasional di Indonesia. Hoaks politik tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang menyesatkan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan persepsi publik melalui eksploitasi isu-isu sensitif seperti agama,

menunjukkan bahwa pemahaman tentang cek fakta dan verifikasi informasi dapat membantu masyarakat lebih selektif sebelum menyebarkan informasi di ruang digital.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam menanggulangi meredakan hoaks. Mengingat penyebaran hoaks sering terjadi dalam jaringan sosial berbasis kepercayaan, keterlibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal sangat penting. Program edukasi yang dilakukan langsung di tingkat komunitas dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dibandingkan pendekatan yang bersifat top-down.

Selain itu, mengintegrasikan literasi digital dalam sistem pendidikan adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih tangguh dalam menghadapi disinformasi. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media untuk membentuk pola pikir kritis dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi informasi.

Dengan demikian, penanggulangan hoaks harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penyebaran hoaks, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan informasi masyarakat serta menjaga integrasi nasional di tengah arus informasi digital yang semakin kompleks.

etnis, dan ideologi. Karakteristik hoaks yang sederhana, provokatif, dan mudah disebarkan melalui algoritma media sosial menjadikannya efektif dalam menjangkau masyarakat luas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks politik berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi sosial. Polarisasi ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pendapat dalam sistem demokrasi, tetapi juga berkembang menjadi pembelahan sosial yang tajam dan

emosional. Fenomena seperti *echo chamber* dan *filter bubble* memperkuat kondisi ini dengan membatasi paparan individu terhadap perspektif berbeda, sehingga memperkuat keyakinan yang ada dan mempersempit ruang dialog publik.

Dampak dari polarisasi adalah potensi terjadinya disintegrasi sosial. Menurunnya tingkat kepercayaan antar kelompok masyarakat serta melemahnya kohesi sosial menunjukkan bahwa hoaks politik memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas sosial. Dalam hal ini, integrasi nasional sebagai fondasi persatuan bangsa menjadi rentan terhadap gangguan akibat disinformasi.

Selain itu, hoaks politik juga mempengaruhi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan sistem demokrasi. Ketidakmampuan masyarakat membedakan informasi valid dan tidak valid mendorong munculnya skeptisisme terhadap pemerintah dan proses politik. Jika kondisi ini berlanjut, dapat berdampak pada melemahnya legitimasi politik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penyebaran hoaks politik di media sosial memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya polarisasi sosial yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap integrasi nasional di Indonesia. Hoaks bukan hanya masalah komunikasi, tetapi juga ancaman struktural terhadap stabilitas sosial dan keutuhan bangsa.

Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Peningkatan keterampilan literasi digital penting agar masyarakat tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu memperkuat edukasi mengenai bahaya hoaks politik melalui program literasi digital dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, platform media sosial diharapkan dapat meningkatkan

pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu. Upaya tersebut dapat membantu mengurangi dampak polarisasi sosial serta menjaga integrasi nasional di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, N. (2022). Disinformation order and social media algorithmic trap: New challenges for sustainability of the Indonesia's United Nation-State narrative and liberal democratic norms. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(2), 134-149
- Andriarti, A., Nurmadewi, D., Suharyanti, S., Yulianti, R. D., Ariyanto, R., & Fadhil, R. (2024). Literasi Digital Melawan Hoaks Pemilu 2024. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 838-844
- Ati, R. M., Rhangga, A., & Anggraini, P. (2023). Literasi Digital Sebagai Upaya Kritis Memerangi Berita Bohong: Studi Terhadap Gerakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 7(3), 420-429
- Azis, H., Indreswari, E. P., & Ramadhani, O. R. K. (2025). A DECADE OF INDONESIAN POLITICS: THE ESCALATION OF POLITICAL INFORMATION DISORDER AND STRATEGIES TO ADDRESS IT IN THE DIGITAL ERA. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 29(2), 145-164
- Boestam, A. B., Prakosa, A., & Avianto, B. N. (2023). Upaya partai politik dalam memanfaatkan demokrasi virtual di era digital. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(1), 1-17
- Cavus, N., Goksu, M., & Oktekin, B. (2024). Real-time fake news detection in online social networks: FANDC

- Cloud-based system. *Scientific Reports*, 14(1), 25954
- Chan, C. K., Zhao, M. M., & Lee, P. S. (2023). Determinants of escape from echo chambers: The predictive power of political orientation, social media use, and demographics. *Global media and China*, 8(2), 155-173
- Chuai, Y., & Zhao, J. (2022). Anger can make fake news viral online. *Frontiers in Physics*, 10, 970174
- Diaz Ruiz, C., & Nilsson, T. (2023). Disinformation and echo chambers: how disinformation circulates on social media through identity-driven controversies. *Journal of public policy & marketing*, 42(1), 18-35
- Farkas, J., & Schou, J. (2023). *Post-truth, fake news and democracy: Mapping the politics of falsehood*. Routledge
- Hameleers, M., Brosius, A., & de Vreese, C. H. (2022). Whom to trust? Media exposure patterns of citizens with perceptions of misinformation and disinformation related to the news media. *European journal of communication*, 37(3), 237-268
- Hidayati, S., Hayat, N., & Ainul, S. M. (2023). Pengabdian kepada Masyarakat dalam Sinergitas Akademisi Jurnalistik Islam Tangkal Hoax pada Masyarakat Literasi Desa Corawali. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 5(1), 14-20
- Hidayati, S., Hayat, N., Hilmiyah, M., Suhardi, S., & Sunandar, S. (2024). Deteksi Hoaks Dan Ujaran Kebencian Masyarakat Daerah Terpencil Desa Bakaru Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 4(1), 30-45
- Jungherr, A. (2024). Foundational questions for the regulation of digital disinformation. *Journal of Media Law*, 16(1), 8-17
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Kominfo temukan 355 konten hoaks pemilu sebelum kampanye, 290 di-take down*
- MUHAMMAD, S. A., ALIF, D. M., INDRIANI, P., & NOERMA, K. F. (2024). Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya. *SABER*, 2(2), 34-39
- Novarizal, R. (2023). Tinjauan Kriminologis tentang Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Seputar Pemilu 2024 di Media Sosial Facebook. *Sisi Lain Realita*, 8(2), 12-19
- Nurhaliza, S. T., Febriyanti, A., & Lukman, F. (2023). Peran Media Sosial Dalam Proses Demokrasi: Analisis Peran Dan Dampak Media Sosial Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2019. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 24-34
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2022). Accuracy prompts are a replicable and generalizable approach for reducing the spread of misinformation. *Nature communications*, 13(1), 2333
- Sun, H. (2022). Regulating algorithmic disinformation. *Colum. JL & Arts*, 46, 367
- Zozaya-Durazo, L. D., Sádaba-Chalezquer, C., & Feijoo-Fernández, B. (2024). "Fake or not, I'm sharing it": teen perception about disinformation in social networks. *Young Consumers*, 25(4), 425-438